



## PERBANDINGAN SISTEM KENEGARAAN DI SWEDIA DAN FINLANDIA BERDASARKAN SISTEM POLITIKNYA

**Nitaria Angkasa**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro

### ABSTRAK

Setiap negara memiliki sistem politik yang sama namun dalam pelaksanaan berbeda. Hal ini berdasarkan sistem politik yang di anut oleh masing-masing negara dunia, seperti halnya di Negara Swedia dan Negara Finlandia. Kedua negara tersebut memiliki kesamaan yaitu parlementer. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perbandingan sistem kenegaraan Swedia dan Finlandia berdasarkan sistem politiknya. Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu berdasarkan ketentuan dokumen, undang-undang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem politik yang berjalan di Swedia dan juga di Finlandia, sebenarnya yang menjadi perbedaan hanya terletak di siapa yang menduduki badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mengenai yang menjadi input, antara kedua negara juga sama-sama memiliki kelompok kepentingan. Bisa dari kelompok anomi, kelompok nonasosiasional, kelompok institusional, maupun kelompok asosiasional..

**Kata Kunci: Swedia, Finlandia, Sistem Politik.**

### 1. PENDAHULUAN

Sistem politik adalah sekumpulan pendapat, prinsip, yang membentuk satu kesatuan yang berhubungan satu sama lain untuk mengatur pemerintahan serta melaksanakan dan mempertahankan kekuasaan dengan cara mengatur individu atau kelompok individu satu sama lain atau dengan Negara dan hubungan Negara dengan Negara. Sistem politik juga menurut penulis adalah mekanisme atau cara kerja seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik yang berhubungan satu sama lain dan menunjukkan suatu proses yang langggeng.<sup>1</sup> Perbandingan politik digunakan untuk membandingkan apapun yang berkaitan dengan pemerintahan maupun tidak. Salah satu ahli teori perbandingan politik adalah Gabriel A Almond, Almond awalnya menggunakan teori Easton yang fokus kepada politik mikro, kemudian Almond memodifikasinya agar lebih focus kepada politik makro.

\*Corresponding author.

E-mailaddress:dauri170996@gmail.com

PeerreviewedunderresponsibilityofUniversitas MuhammadiyahMetro

© 2021Universitas MuhammadiyahMetro,Allrightreserved.



MuhammadiyahLaw Review: JurnalIlmuHukumUniversitas Muhammadiyah  
MetroThisworkis licensedunder a  
CreativeCommonsAttribution4.0InternationalLicense.

<sup>1</sup> Dalam sistem politik dikenal supra struktur politik dan infrastruktur politik. Perbandingan berbagai negara dengan berbagai warna sistem politik merupakan salah satu bidang analisis politik yang menarik dan penting. Studi perbandingan ini dapat membantu kita untuk memahami bagaimana bekerjanya berbagai sistem politik, ciri-ciri apa dari berbagai sistem politik yang sama. Artinya perbandingan sistem politik juga tidak terlepas dari teori-teori sistem politik yang ada.

Sistem politik memainkan peran penting dalam potensi dari suatu negara dan diartikan bahwa ada interaksi antar aktor-aktor yang ada.<sup>2</sup> Sistem politik mempunyai struktur yang tersusun dari beberapa kategori seperti, kelompok kepentingan, partai politik, badan peradilan, dewan eksekutif dan legislatif, yudikatif. Topik- topik yang dicakup mulai dari mengapa dan bagaimana caranya membandingkan sistem politik sampai dengan negara, pemerintah dan kebijakan publik. Dalam teori perbandingan politik terdapat budaya politik dan sosialisasi politik, bagi Almond sosialisasi politik mendorong orang untuk berpartisipasi dalam budaya politik masyarakat, sosialisasi terjadi di dalam keluarga, sekolah, pekerjaan, kelompok keagamaan, perkumpulan sukarelawan, partai politik, dan bahkan institusi-institusi pemerintah.

Budaya politik sendiri masuk sebagai cara pandang warga negara tentang sistem politiknya dan setiap bagiannya. Sistem politik adalah totalitas interaksi antar unit-unit yang ada di dalamnya. Interaksi tersebut tidak hanya sebatas pada aktor-aktor formal melainkan pula informal. Dalam Chilcote, 2010 dijelaskan bahwa sistem politik dapat diperbandingkan dalam pengertian-pengertian kinerja fungsi-fungsi tertentu dari struktur-struktur tertentu.

Perbandingan politik (*comparative politics*) mempelajari kegiatan-kegiatan politik dalam cakupan lebih luas, termasuk mengenai pemerintahan dan berbagai lembaganya dan juga aneka organisasi yang tidak secara langsung berhubungan dengan pemerintahan (antara lain adalah suku bangsa, masyarakat, asosiasi-asosiasi, dan berbagai perserikatan). Istilah perbandingan politik juga diartikan sebagai upaya untuk membandingkan segala bentuk kegiatan politik, baik itu yang berkaitan dengan pemerintahan maupun yang tidak berhubungan dengan pemerintahan.<sup>3</sup>

Dalam teori perbandingan politik terdapat 2 hal yaitu budaya politik dan sosialisasi politik. Kedua hal tersebut merupakan fungsi sistem politik yang akan di jalankan pada setiap negara yang memegang teguh pemerintahan parlementer maupun presidensial.<sup>4</sup> Terkait dengan penjelasan tersebut diatas, maka dalam makalah ini penulis akan membahas permasalahan yaitu berkaitan dengan pelaksanaan sistem politik dari kedua negara tersebut dan kelebihan yang dapat diterapkan di negara Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam penelitian ini penulis akan membandingkan sistem politik yang ada di Negara Swedia dan Finlandia, kedua negara

---

<sup>2</sup> David, Easton, *Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik*, Jakarta: Bina Aksara, 2001, hlm. 5.

<sup>3</sup> H. Ronald, Chilcote, *Perbandingan POLitik, Penelusuran Paradigma*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 15

<sup>4</sup> Pamudji.S, *Perbandingan Sistem Politik Negara*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 2000, hlm. 45.

tersebut merupakan negara eropa. Swedia dan Finlandia memiliki kesamaa sistem pemerintahan yaitu parlementer, yang artinya perdana menteri sebagai kepala pemerintahan dan presiden kepala negara. Dengan demikian kedua negar tersebut memiliki sistem pemerintahan yang sama, namun belum tentu sistem politik yang ditetapkan di masing-masing negara juga sama. Oleh karenanya membandingkan sistem politik yang ada di kedua negara tersebut menjadi hal yang sangat menarik untuk di kaji.

## **2. METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan kajian literatur. Kajian literatur atau penelitian kepustakaan (literature review atau literature research) merupakan penelitian yang menelaah, meninjau atau mengkaji secara kritis suatu pengetahuan, gagasan, ide atau temuan yang terdapat dalam suatu literatur dengan berorientasi akademik (academic-oriented literature), serta merumuskan dan mengkonstruksi kontribusi teoritis dan metodologis untuk suatu topik tertentu.<sup>5</sup> Fokus dari kajian literatur adalah menemukan berbagai gagasan, prinsip, dalil, teori, atau hukum yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis sebagai upaya dalam menjawab pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Metode analisis dalam penelitian dengan kajian literatur ini adalah bersifat analisis deskriptif, yaitu interpretasi gagasan atau informasi/ data dilakukan secara teratur kemudian diberikan penjelasan secara jelas agar dapat dipahami dengan baik. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan socio-legal. Socio-legal studies mengembangkan anti metanarasi, anti totalitas dan anti universalitas kedalam kajian-kajian mengenai hukum

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **a) Sistem Politik di Swedia**

Swedia adalah negara monarki konstitusional. Artinya swedia masih mengakui keberadaan raja atau ratu sebagai pemimpin mereka. Saat ini swedia memiliki seorang kepala negara bernama Carl gustaf folke hubertus. Walau memiliki raja dalam negara, raja tidak mempunyai kuasa penuh dalam memimpin pemerintahan, kekuasaan raja hanya sebatas fungsi representatif dan seremonial. Badan legislatif negara ini berupa riksdag, yaitu suatu parlemen yang berisi anggota orang-orang dari beragam partai, misalnya partai liberal, moderat, dan kristen moderat. Secara garis besar, riksdag memiliki wewenang untuk

---

<sup>5</sup> Peter Mamud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 32

mengambil keputusan dalam negeri. Selain itu, riksdag juga bertugas untuk menunjuk perdana menteri serta mengesahkan undang-undang. Mengingat untuk lebih jelasnya sistem politik dan pemerintahan yang ada di Swedia, berikut adalah poin-poin penting mengenai konstitusi, eksekusi, dan legislatif:<sup>6</sup>

- a) Konstitusi Swedia memiliki 4 aturan atau undang-undang hukum dasar. Pertama adalah instrument pemerintahan 1774, undang-undang pengganti 1809, undang-undang kebebasan pers 1766, dan yang terakhir adalah undang-undang kebebasan berpendapat 1991.
- b) Badan eksekutif. Badan eksekutif negara Swedia terdiri atas seorang raja Swedia yang memiliki tugas representatif. Bila raja ini nantinya meninggal atau habis masa jabatan, maka akan digantikan oleh pewaris tahta yang tak lain adalah anaknya sendiri.
- c) Kepala pemerintahan. Kepala pemerintahan Swedia adalah perdana menteri. Dalam menjalankan tugas-tugasnya ia akan didampingi oleh seorang wakil perdana menteri.
- d) Pemerintahan. Pemerintahan Swedia yang dipimpin perdana menteri juga dikontrol oleh sekitar 22 menteri di segala bidang. Bila perdana menteri di tunjuk langsung oleh riksdag, maka ke-22 menteri yang bekerja di pemerintahan akan di pilih berdasarkan kebijakan perdana menteri itu sendiri.
- e) Badan legislatif. Badan legislatif negara Swedia adalah riksdag. Parlemen ini memiliki 349 anggota dari beberapa partai dan pemilihannya selalu di gelar 4 tahun sekali, biasanya sekitar bulan september.

Beberapa partai di Swedia yang berhasil memenangkan pemilu terakhir yang di selenggarakan pada 2018 lalu. Misalnya partai demokrat Swedia yang berhasil mendapatkan kursi majelis atau riksdag sebanyak 20 kursi. Padahal sebelumnya pada 2012 partai ini hanya memperoleh suara sebanyak 2,9%. Pemunculan atau penderian partai ini merupakan kelanjutan dari suatu gerakan bernama “Swedia hanya untuk Swedia”. Gerakan ini didirikan oleh sekelompok orang yang tidak senang dengan kedatangan kaum imigran. Mereka mendirikan gerakan tersebut pada tahun 1979. Sebagian besar pendirinya merupakan bekas anggota organisasi yang mendukung gerakan dan aksi lain yang pro neo nazi.

Sebelum partai demokrat yang mulai berdiri pada tahun 1988 tidak pernah mendapatkan dukungan dari rakyat. Bahkan lebih sering mendapat sasaran politik dan kemarahan akibat gerakan neo nazi mereka. Namun beberapa tahun yang lalu, para petinggi partai itu

---

<sup>6</sup> Ponce, Alejandro. 2015. “Open Government Index 2015 Report” dalam World Justice Project vol. 1 no. 1, hlm. 210-222

menyusun program dan gerakan retroika lain yang memojokan agama islam. Padahal pada saat bersamaan di eropa sedang muncul isu-isu yang menyebut islam berasal dari sumber terorisme dan menimbulkan berbagai macam kerusuhan dan permasalahan lain di dunia. demi meraih dukungan dari rakyat, mereka tidak sumkan melakukan kritikan secara membabi buta pada tahun imigran, terutama dari kalangan islam.

Kekuasaan legislatif di jalankan oleh riksdag, sedangkan kekuasaan eksekutif di jalankan oleh perdana menteri dan kabinet. swedia memiliki judicial review wajib, meskipun review non wajib dilakukan oleh lagradet (dewan hukum) sebagian besar dihormati dalam hal teknis tapi kurang begitu dihormati dalam hal politik yang kontroversial. Kisah riksdag dan keputusan pemerintahan dapat dibuat tiadak berlaku pada setiap tingkat jika mereka nyata terhadap hukum konstitusional. Namun, karena pembatasan dalam bentuk jucial review dan pengadilan yang lemah, hal ini memiliki konsikkuensi praktis kecil.

Elgisiasi dapat dimulai oleh kabinet atau oleh anggota riksdag. Anggotanya dapat di pilih berdasarkan perwakilan proporsional untuk masa jabatan empat tahun. Konstitusi swedia dapat diubah oleh riksdag, yang membutuhkan mayoritas sederhana tapi mutlak dua suara yang terpisah. Swedia mempunyai empat hukum yaitu:<sup>7</sup>

- a) Instrumen pemerintah.
- b) UU royal suksesi.
- c) Kebebasan UU pers.
- d) UU dasar tentang kebesan berekpresi.

Partai sosial demokrat swedia memainkan peran politik termuka sejak tahun 1917, setelah reformis telah di konvermasikan seluruh kekuatan dan kaum revolusioner meninggalkan pertai. Setelah tahun 1932 selurauh bagian telah dikuasai oleh partai demokrat sosial. Hanya lima pemilihan umum (1976, 1979, 1991, 2006, dan 2010) telah memberikan blok kanan-tengah cukup kursi di rikssdag untuk membentuk sistem pemerintahan. Namun, karena kinerja ekonomi yang buruk sejak tahun 1970-an dan terutama sejak krisis fiskal awal 1990-an, sistem politik swedia telah menjadi kurang satu sisi, dan lebih seperti negara-negara eropa lainnya. Dalam pemilihan umum ditahun 2006 partai moderat, bersekutu dengan pertai pusat, partai rakyat liberal, dan partai kristen demokrat membentuk aliansi kanan-tengan dan swedia dan memenangkan mayoritas suara di pemilihan umum. Mereka bersama-sama membentuk pemerintahan mayoritas dibawah

---

<sup>7</sup> Botero, Juan Carlos. 2014. "Rule of Law Index 2014" dalam World Justice Project vol. 1 no. 1, hlm. 30- 45.

kepemimpinan pemimpin partai moderat yaitu fredrik reinfeldt. Pada pemilihan umum 2010 aliansi berpendapat terhadap blok kiri terpadu yang terdiri dari partai sosial demokrat.

Berikut ini adalah komposisi saat ini partai riksdag, yang diselenggarakan oleh spektrum politik kedalam kategori tengah-kanan dan kiri tengah yaitu: Partai kanan-tengah:

- a) Partai moderata (samlingspartiet).
- b) Liberal party (folkpartiet liberalema).
- c) Partai usat (centerpartiet).
- d) Demokrat kriter (kristdemokraterna).
- e) Demokrat swedia (sviregededemokraterna).

Partai kiri-tengah:

- Sosial demokrat (sosial demokraterna).
- The green milinartiet.

Jumlah pemilihan di swedia selalu tinggi dengan perbandingan internasional, meskipun telah menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan saat ini sekitar 80% (80,11% pada tahun dan 81,99% pada tahun 2006). Polisi swedia menikmati tingkat kepercayaan yang tinggi dari warga pada tahun 1960, namun, tingkat kepercayaan terus menurun dari tahun ke tahun dan sekarang pada tingkat yang jauh lebih rendah dari pada tetangga skandinavia. Beberapa tokoh telah banyak dikenal di kancah internasional, diantaranya Raoul wallenberg, Folke bernadotte, mantan sekertaris jendral PBB Dag hammarskjold, mantan perdana menteri Olof palme, mantan perdana menteri dan menteri luar negeri Carl bildt, mantan president majelis umum PBB Jan eliasson, dan mantan badan energi atom internasional irak inspektur Hans blix.

## **B. SISTEM POLITIK DI FINLADIA**

Politik Finlandia berlangsung dalam kerangka perwakilan parlemen republik demokrasi dan sistem multi-partai. Presiden Finlandia adalah kepala negara, memimpin kebijakan luar negeri, dan Komandan-in-chief dari Angkatan Pertahanan. Perdana Menteri Finlandia adalah kepala pemerintahan; kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh pemerintah. Kekuasaan legislatif dipegang oleh Parlemen Finlandia, dan pemerintah memiliki hak terbatas untuk mengamandemen atau memperpanjang undang-undang. Presiden memiliki hak veto atas keputusan-keputusan parlemen meskipun dapat dibanjiri oleh parlemen.

Meskipun Finlandia memiliki sistem terutama parlemen, presiden memiliki beberapa kekuatan penting. Kebijakan luar negeri dipimpin oleh presiden, "bekerjasama" dengan kabinet, dan yang sama berlaku untuk hal-hal mengenai keamanan nasional. Kekuasaan eksekutif utama terletak pada kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri. Sebelum

menulis ulang konstitusi, yang selesai pada tahun 2000, presiden menikmati kekuasaan lebih. Finlandia menikmati kebebasan individu dan politik, dan hak pilih universal pada 18, wanita Finlandia menjadi yang pertama di dunia yang memiliki hak tak terbatas baik untuk memilih dan berdiri untuk parlemen.

Mengenai sistem politik di Finlandia juga memiliki sistem yang sama dengan di Swedia. Yang membedakan hanyalah para oknum yang menduduki fungsi input maupun output dari sistem politik yang Almond kemukakan. Sistem pemerintahan yang dijalani oleh Finlandia adalah sistem Parlemerter yang berarti kepala negara diduduki oleh seorang Raja/Ratu sedangkan kepala pemerintahannya diduduki oleh seorang Perdana Menteri. Yang akan dijelaskan mengenai kelompok kepentingan di sistem politik di Finlandia adalah partai politik. Partai politik di Finlandia menganut sistem partai yang sama dengan Swedia, yaitu sistem multi partai.

Mengenai proses rekrutmen politiknya, Finlandia merupakan negara yang melaksanakan pemilihan umum dalam jangka waktu tiga tahun sekali. Berbeda dengan Swedia yakni 5 tahun sekali. Dimana masa suatu parlemen berkisar dua setengah tahun.<sup>8</sup> Dan pada praktiknya, pemilihan umum diadakan ketika Gubernur Jenderal menyetujui permintaan dari Perdana Menteri yang memilih tanggal pemilihan umum.<sup>9</sup>

Lembaga-lembaga yang bertugas di dalam badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif juga berbeda dengan yang terjadi di Swedia. Badan eksekutif di Finlandia diduduki oleh Parlemen, Parlemen itu sendiri juga diduduki oleh Majelis Tinggi yaitu Senate, yang wewenangnya terbatas, Senate juga terkadang disebut dengan House of Review.<sup>10</sup> Untuk badan eksekutif di Finlandia, Perdana Menteri dan Menteri merupakan anggota dari House of Representatives, berasal dari partai politik mayoritas di House of Representatives.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Rahmi Yulia, PDF File: Perbandingan Partai Politik Australia dengan Selandia Baru, (Universitas Riau), slide 1. Yang diakses melalui

[https://www.academia.edu/1469211/Perbandingan\\_Partai\\_Politik\\_Finlandia\\_dengan\\_Selandia\\_Baru](https://www.academia.edu/1469211/Perbandingan_Partai_Politik_Finlandia_dengan_Selandia_Baru). Diakses pada 24 April 2020 Pukul 19:01 WIB

<sup>9</sup> [http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem\\_pemerintahan.html](http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html). Diakses pada 24 April 2020 Pukul 19:10 WIB.

<sup>10</sup> Singleton et. al., Finlandia Political Institution, ed. ke-6 (Finlandia: Longman, 2000) hlm. 130. Diakses pada 24 April 2020 Pukul 19:23 WIB.

<sup>11</sup> Wawan Darmawan, PDF File: Lahirnya Commonwealth of Finladia & Pemerintahannya, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia), slide 3.

[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR.\\_PEND.\\_SEJARAH/197101011999031-](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/197101011999031-WAWAN_DARMAWAN/PEMERINTAHAN_FINLANDIA.pdf)

[WAWAN\\_DARMAWAN/PEMERINTAHAN\\_FINLANDIA.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/197101011999031-WAWAN_DARMAWAN/PEMERINTAHAN_FINLANDIA.pdf). Yang diakses melalui. Diakses pada 25 Desember 2013 Pukul 16:37 WIB.

Kemudian untuk badan yudikatif, sama halnya dengan kejaksaan. Yang diduduki oleh Mahkamah Agung dan pengadilan federal-federal lainnya.<sup>12</sup> Sama halnya dengan yang terjadi di Swedia antara partai-partai politik yang memiliki suatu tujuan pastinya dalam menjalankan tugas harus menjalankan komunikasi yang baik dengan lembaga-lembaganya. Sehingga tujuan dari kelompok-kelompok kepentingan tersebut dapat tercapai. Mengenai output (hasil) yang nanti akan terjadi, itu semua akan bergantung pada semua yang dilakukan oleh kelompok kepentingan dan juga lembaga-lembaga yang berada di dalam suatu negara.

Konstitusi Finlandia dan tempatnya dalam sistem peradilan yang tidak biasa dalam bahwa tidak ada mahkamah konstitusi dan mahkamah agung tidak memiliki hak yang tegas untuk menyatakan hukum konstitusional. Pada prinsipnya, konstitusionalitas undang-undang di Finlandia diverifikasi oleh suara sederhana di parlemen (lihat kedaulatan Parlemen). Namun, Komite Hukum Konstitusi (Finlandia: perustus lakivaliokunta, Swedia: grundlagsutskottet) dari parlemen ulasan tagihan-tagihan ragu dan merekomendasikan perubahan, jika diperlukan. Dalam prakteknya.

Komite Hukum Konstitusi memenuhi tugas peradilan konstitusi. Sebuah keganjilan Finlandia adalah kemungkinan untuk membuat pengecualian terhadap konstitusi dalam hukum biasa yang diberlakukan pada prosedur yang sama seperti amandemen konstitusi. Contoh hukum yang demikian adalah Negara UU Kesiapsiagaan yang memberikan Pemerintah kekuasaan luar biasa tertentu dalam keadaan darurat nasional. Sebagai kekuatan ini, yang sesuai dengan perintah eksekutif AS, mempengaruhi hak-hak dasar konstitusional, hukum diberlakukan dengan cara yang sama sebagai amandemen konstitusi. Namun, dapat dicabut dengan cara yang sama sebagai hukum biasa. Selain preview oleh Komite Hukum Konstitusi, semua pengadilan Finlandia hukum memiliki kewajiban untuk mendahulukan konstitusi ketika ada konflik yang jelas antara konstitusi dan undang-undang biasa. Artinya, bagaimanapun, sangat langka.

Sistem peradilan Finlandia adalah sistem hukum sipil terbagi antara pengadilan dengan yurisdiksi perdata dan pidana biasa dan pengadilan administratif dengan yurisdiksi atas litigasi antara individu dan administrasi publik. Hukum Finlandia dikodifikasi dan berdasarkan hukum Swedia dan dalam arti yang lebih luas, hukum perdata atau hukum Romawi.

---

<sup>12</sup> Hidayatun Ni'mah, Doc: Sistem Politik Finlandia, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah) hlm. 2. Yang diakses melalui <http://www.scribd.com/doc/29425478/Sistem-Politik.Finlandia>. Diakses pada 24 April 2020 Pukul 17:01 WIB.



Perjalan kengaran tersebut di atas, tidak terlepas dari sistem politik yang di jalankan, karena berjalannya sebuah sistem politik harus ada dukungan dari berbagai elemen kelembagaan yang terdapat dalam suatu negara. Finlandia merupakan sistem pemerintahan parlementer yang juga harus memiliki sistem politik yang kuat, dalam hal ini sistem politik yang menjadi pengauasa adalah raja dan menteri yang berhak mengeluarkan kibijakan yang terdapat dalam negara tersebut. Oleh karenanya perjalan sistem politik di Finlandia sangat di dominan oleh kekuatan para elit politik raja.

Untuk partai politik lain melihat partai politik di Finlandia. Gambaran tentang pemilu dan hasil pemilu termasuk Pemilu di Finlandia. Sistem proporsional Finlandia mendorong banyak partai politik dan telah mengakibatkan banyak koalisi lemari. Dahulu harapan hidup pemerintah koalisi telah pendek, tapi sejak sekitar tahun 1980 tren telah bahwa aturan koalisi yang sama untuk seluruh periode antara pemilu. Finlandia memilih pada tingkat nasional kepala negara-presiden-dan legislatif. Presiden dipilih untuk masa jabatan enam tahun oleh rakyat. Parlemen (Finlandia: eduskunta, Swedia: Riksdag) memiliki 200 anggota, dipilih untuk masa jabatan empat tahun oleh perwakilan proporsional dalam pemilihan multi-kursi.

Finlandia memiliki sistem multi-partai, dengan tiga partai yang kuat, di mana tidak ada satu partai yang sering memiliki kesempatan untuk memperoleh kekuasaan saja, dan pihak harus bekerja dengan satu sama lain untuk membentuk pemerintahan koalisi. Selain pemilihan presiden dan parlemen, ada pemilihan Parlemen Eropa setiap lima tahun, dan pemilihan kota setempat (digelar serentak di setiap kota) setiap empat tahun.

### **C. Analisis Perbandingan Sistem Politik Swedia dan Finlandia**

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai sistem politik yang berjalan di Swedia dan juga di Finlandia, sebenarnya yang menjadi perbedaan hanya terletak di siapa yang menduduki badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mengenai yang menjadi input, antara kedua negara juga sama-sama memiliki kelompok kepentingan. Bisa dari kelompok anomi, kelompok nonasosiasional, kelompok institusional, maupun kelompok asosiasional.

Selanjutnya mengenai sistem politik, juga antara kedua negara sama karena berjalannya sistem politik ini berdasarkan sistem politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Kemudian yang terakhir untuk hasil yang maksimal akan bergantung kepada berjalannya sistem politik itu sendiri, baik atau buruknya. Hal ini yang menjadi dasar pijakan bagi kedua negara dalam menjalankan sistem politiknya. Pada dasarnya sistem politik itu berjalan baik atau buruknya tergantung pada siapa yang menjadi aktor dalam perjalanan sistem politik tersebut.

Dampak sistem politik yang di terapkan oleh Swedia dan Finlandia tersebut pada akhirnya akan di rasakan oleh masyarakat, baik masyarakat kaum elit maupun kaum biasa. Hal tersebut dikarenakan masyarakat adalah konsep induk oleh sebab sistem politik hanya merupakan salah satu dari sistem-sistem lain yang ada di masyarakat seperti sistem ekonomi, sistem sosial dan budaya, sistem kepercayaan dan lain sebagainya. Sistem politik sendiri merupakan abstraksi (realitas yang diangkat ke alam konsep) dari kondisi real kondisi perpolitikan di suatu masyarakat. Seperti telah dijelaskan, suatu masyarakat tidak hanya terdiri atas satu sistem (misalnya sistem politik saja), melainkan terdiri atas multi sistem. Sistem yang biasanya dipelajari kinerjanya adalah sistem politik, sistem ekonomi, sistem agama, sistem sosial, atau sistem budaya.

Pada dasarnya konsep sistem politik yang di anut oleh Finlandia, merupakan sebuah modifikasi dari Swedia. Hal ini sebabkan negara Finlandia merupakan negara jajahan swedia, dan bentuk negara Finlandia pun masi mengarah pada sistem yang berlaku di swedia. Namun dengan demikian kebijakan yang dibuat di negara Finlandia tidak semata-mata meniru dari Swedia, akan tetapi hanya di jadikan sebagai acuan dan hasil yang akan dituju oleh negara tersebut.

Akan tetapi, sebagaimana dinyatakan oleh para filosof politik Yunani dan Romawi, pemerintahan sedikit orang tidaklah berarti bahwa pembuatan keputusan akan selalu tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan dan tuntutan-tuntutan sejumlah besar orang yang ada dalam masyarakat. Artinya dari setiap kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan harus mempertimbangkan dampak yang akan dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat selalu merasakan dampak sistem politik yang telah menjadi kebijakan yang di terapkan oleh masing-masing negara, yang dalam hal ini negara Swedia dan Finlandia.

#### **4. PENUTUP**

Kesimpulan yang dapat diambil dari perbandingan sistem politik antara Swedia dan Finlandia adalah mengenai jalannya sistem politik sama saja, karena yang dilakukan adalah membandingkan sistem politik yang dikemukakan oleh Gabriel Almond. Kemudian juga bagaimana suatu negara sukses dalam menjalankan sistem politiknya adalah menurut saya dengan bagaimana cara mereka melakukan menampung berbagai aspirasi dari masyarakatnya sehingga tujuan yang dikemukakan oleh kelompok-kelompok kepentingan dapat tercapai. Sistem politik yang berjalan di Swedia dan juga di Finlandia, sebenarnya yang menjadi perbedaan hanya terletak di siapa yang menduduki badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Mengenai yang menjadi input, antara kedua negara juga sama-sama memiliki

kelompok kepentingan. Bisa dari kelompok anomi, kelompok nonasosiasional, kelompok institusional, maupun kelompok asosiasional.

### **Daftar Pustaka**

- Botero, Juan Carlos. 2014. "Rule of Law Index 2014" dalam World Justice Project vol. 1 no. 1, hlm. 30-45
- . David, Easton. 2001. Kerangka Kerja Analisis Sistem Politik, Jakarta: Bina Aksara.
- H. Ronald, Chilcote, Perbandingan POLitik, Penelusuran Paradigma, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hidayatun Ni'mah, Doc: Sistem Politik Finlandia, (Jakarta: Universitas Muhammadiyah) hlm. 2.
- [http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem\\_pemerintahan.html](http://www.indonesia.embassy.gov.au/jaktindonesian/sistem_pemerintahan.html). Diakses pada 24 April 2020 Pukul 19:10 WIB.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media.
- Mas'oeed dan Colin Mac Andrews. 1999. Perbandingan Sistem Politik, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Maswadi Rauf dan Mappa Nasrun. 1993. Indonesia dan Komunikasi Publik, Jakarta: Gramedia.
- Pamudji.S. 2000. Perbandingan Sistem Politik Negara, Jakarta: PT. Bina Aksara.
- Ponce, Alejandro. 2015. "Open Government Index 2015 Report" dalam World Justice Project vol. 1 no. 1, hlm. 210-222.
- Rahmi Yulia, PDF File: Perbandingan Partai Politik Australia dengan Selandia Baru, (Universitas Riau), slide 1. Yang diakses melalui [https://www.academia.edu/1469211/Perbandingan\\_Partai\\_Politik\\_Finlandia\\_dengan\\_Selandia\\_Baru](https://www.academia.edu/1469211/Perbandingan_Partai_Politik_Finlandia_dengan_Selandia_Baru). Diakses pada 24 April 2020 Pukul 19:01 WIB.
- Sadat. Anwar 2017. Perbandingan Sistem Politik dan Pemerintahan, Yogyakarta: Deepublish.
- Singleton et. al. 2000. Finlandia Political Institution, ed. ke-6 Finlandia: Longman,
- Wawan Darmawan, PDF File: Lahirnya Commonwealth of Finlandia & Pemerintahannya, (Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia).